



REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PENGANTAR DAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2026**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Mei 2025

**Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.**

Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tenteram, dan tetap terus terjaganya persatuan bangsa yang kuat. Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas terselenggaranya **Rapat Paripurna guna menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026**. Sesuai amanat Konstitusi dan Undang-Undang, KEM-PPKF tahun 2026 merupakan proses Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Pada forum yang baik ini, dan karena bulan Syawal belum lama berlalu, izinkan kami juga menyampaikan Selamat Hari Raya Idulfitri 1446 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
2. **KEM-PPKF Tahun 2026 disusun oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33**, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

3. **Penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental** yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi “*inward looking*” serta prinsip “*my country first*” telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun oleh dominasi Barat/Amerika Serikat. Blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antarnegara ditinggalkan dan tidak lagi dihormati. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi globalisasi ekonomi sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Volatilitas dan ketidakpastian global melemahkan kegiatan ekspor-impor serta mendorong aliran modal keluar (*capital outflow*), yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.
4. **Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025, dapat dibandingkan dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang diadopsi Amerika Serikat 125 tahun lalu.** Jarum sejarah dunia seakan berputar kembali dan mundur satu abad ke belakang di Amerika Serikat, atau bahkan mundur ke abad 16 hingga 18 sewaktu kebijakan Merkantilisme mendominasi dunia, yang memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan dua minggu terakhir juga perlu kita simak bersama, dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat - Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam, dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga

melakukan tarif balasan atau retaliasi. Peran *World Trade Organization* (WTO) yang diciptakan sebagai tempat negosiasi *dispute/persengketaan* dagang antarnegara secara *de facto* tidak berjalan. **Dinamika proses negosiasi ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, dagang, keuangan, dan bahkan perang militer antarnegara.**

5. **Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun.** Apabila dibandingkan dengan data di triwulan yang sama tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan misalnya, mengalami kontraksi 0,1% yoy, pertama kali sejak akhir tahun 2020. Malaysia, yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9% yoy, di triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4% yoy. Demikian pula Singapura yang menjadi *hub* bagi perdagangan dan investasi global, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% yoy, menjadi hanya 3,8% yoy. Perekonomian Amerika Serikat, hanya tumbuh 2% yoy, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% yoy, bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3% yoy di triwulan kedua tahun lalu.
6. **Dari perspektif *forward looking*, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026.** IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya akan mencapai level 2,8%, atau 0,5 *percentage point* lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif. Sementara, untuk tahun 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3,0% atau 0,3 *percentage point* lebih rendah dari sebelum perang tarif. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat tinggi mengalami pukulan cukup dalam. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Meksiko dipangkas 1,7 *percentage*

point, Thailand 1,1 *percentage point*, Vietnam 0,9 *percentage point*, dan Filipina 0,6 *percentage point*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4% - lebih kecil dibandingkan koreksi kelompok negara *peers* - pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 menjadi 4,7%, turun masing-masing 0,4 *percentage point* dari proyeksi Januari 2025 sebelum perang dagang memuncak. Pemerintah dengan berbagai mitigasi risiko dan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi berupaya agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5% tahun ini. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi, produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan alat fiskal untuk insentif maupun untuk meredam gejolak serta melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan. Semua ikhtiar ini tentunya dijalankan dengan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan efektif dalam menjalankan misi pembangunan.

Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

- 7. Hari ini tanggal 20 Mei 2025, bertepatan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati sebagai awal pergerakan nasional melawan kolonialisme yang eksploitatif dan jelas tidak adil.** Berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 menandai awal kebangkitan nasional dan semangat perlawanan terhadap penjajahan, yang berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Kini, satu abad kemudian, dunia kembali berubah akibat kebijakan proteksionis seperti tarif dagang tinggi di Amerika Serikat. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan meneladani semangat para pendiri bangsa: terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional.

8. **Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing.** Persaingan di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan sektor keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta.
9. **Sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang strategis dan berbasis daya saing tinggi** yang mampu menarik modal nasional dan global secara produktif, sehingga menghasilkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas. Sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui program pendidikan, terutama berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan lebih tinggi. Program kesehatan universal (semesta) menjadi akses dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Juga perluasan dan penguatan jaring pengaman sosial, memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat, terutama kelompok rentan dan tidak mampu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang melalui berbagai program intervensi lengkap, baik melalui program seperti Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, dan ibu hamil, hingga program Sekolah Rakyat untuk anak tidak mampu. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi serta penguatan ekonomi akar rumput akan terus diperkuat termasuk melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di desa dan kelurahan. Petani, nelayan, dan buruh akan menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak. Selain karena mereka adalah tulang punggung ekonomi kita, juga

untuk menghindarkan dampak negatif globalisasi dalam bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat besar, kemunduran kesejahteraan dan destabilisasi sosial politik di berbagai negara, termasuk negara maju. Membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif, dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua, adalah sesuai dan menjadi mandat dari asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. **Mewujudkan cita-cita tersebut memang tidak mudah dan tidak sederhana.** Berbagai tantangan dan hambatan harus kita atasi, termasuk hambatan dan tantangan struktural yang perlu penanganan konsisten, tekun, serta efektif dalam jangka menengah dan jangka panjang. Berbagai tantangan struktural Indonesia yang terus menjadi perhatian Pemerintah antara lain: (i) bonus demografi Indonesia yang semakin terbatas dan kecenderungan usia penduduk menua; (ii) pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat mendisrupsi seluruh kegiatan ekonomi dan lapangan kerja; (iii) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan; (iv) pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dilandasi tata kelola yang baik dan bersih, serta efisien dan kompetitif; (v) sektor Keuangan yang masih terbatas dan dangkal menghambat kemajuan industri dan perkembangan jasa pelayanan; serta (vi) ancaman perubahan iklim yang harus terus diantisipasi dan dimitigasi.

Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang kami muliakan

11. Di tengah guncangan global dengan tantangan yang sangat berat ini, kita patut bersyukur karena mampu menjaga momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas berkat sinergi dan dukungan dari DPR. **Pada triwulan I-2025 ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, capaian tersebut perlu diperkuat lagi agar momentum pertumbuhan dapat berlanjut.** Langkah reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, yang mencakup kelanjutan program hilirisasi guna meningkatkan kinerja ekspor dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional. Selain itu, perbaikan iklim investasi dan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan partisipasi swasta menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan. Dukungan terhadap pelaku UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat guna memperluas basis ekonomi domestik. Di sisi lain, stabilisasi harga melalui pemanfaatan instrumen APBN untuk menjaga inflasi tetap rendah, serta peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan, menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan.

12. **Meskipun kinerja investasi pada triwulan I tahun ini menghadapi tantangan, dengan pertumbuhan 2,12% yoy, trajektori ke depan diyakini masih akan kuat.** Hilirisasi akan tetap menjadi andalan dengan tahapan yang didorong untuk semakin hilir, dibarengi dengan dukungan untuk investasi yang sejalan dengan tren global dan memberikan nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan infrastruktur energi, transportasi, dan konektivitas digital turut menjadi fokus pemerintah untuk menarik lebih banyak minat investasi, dibarengi dengan penataan dan penyehatan BUMN. Termasuk melalui Danantara, serta simplifikasi birokrasi dan kemudahan berusaha terus dilakukan.
13. **Ekspor tumbuh 6,78% yoy, didukung ekspor nonmigas terutama komoditas terkait hilirisasi, yaitu besi dan baja serta mesin dan peralatan elektrik.** Pemerintah terus suportif menjaga ketahanan ekspor Indonesia dan kontribusinya terhadap PDB di tengah perkembangan tarif global. Dalam jangka pendek, dilakukan upaya negosiasi dengan AS maupun upaya perluasan pasar ekspor. Dalam jangka menengah, struktur produksi juga terus diperkuat, agar semakin mengarah pada produk-produk ekspor bernilai tambah lebih tinggi.

14. **Sektor manufaktur mampu tumbuh positif 4,55% pada triwulan I 2025.** Ekspor sektor manufaktur konsisten ekspansif, mengompensasi penurunan ekspor sektor pertambangan sebagai dampak positif dari hilirisasi yang tercatat sebagai aktivitas industri pengolahan. *Purchasing Managers' Index* (PMI) sebagai cerminan aktivitas sektor manufaktur didominasi tren ekspansif, meskipun turun ke zona kontraksi di level 46,7 pada April 2025. Ke depan, pemerintah terus berkomitmen melanjutkan reformasi struktural dan terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, untuk mempertahankan kinerja ekspor nasional. Penguatan ekspor dilakukan melalui peningkatan kemampuan menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi, dengan *multiplier* terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas yang makin baik, serta memperkuat struktur perindustrian Indonesia.
15. **Sektor pertanian tumbuh 10,52%, memperkuat optimisme menuju ketahanan pangan.** Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan lebih dari 145 regulasi signifikan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Langkah strategis ini, yang secara *timing* bertepatan dengan perkembangan cuaca, berkontribusi terhadap tingkat produktivitas. Produksi beras nasional periode Januari – Maret 2025 meningkat 51% secara *yoy*. Lebih lanjut, data *Rice Outlook* April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN. Secara keseluruhan tahun, produksi di 2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, tumbuh 4,8% *yoy* dari produksi tahun sebelumnya yang sebesar 33,03 juta ton.
16. **Resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari konsistensi upaya Pemerintah menjaga tingkat harga pada level yang ideal.** Inflasi Indonesia termasuk yang paling stabil rendah dibandingkan negara-negara lain, termasuk pada saat menghadapi lonjakan harga pangan di akhir 2023 hingga awal 2024. Perkembangan terkini, Inflasi Indeks Harga

Konsumen (IHK) pada April 2025 berada di level 1,95% yoy, dengan inflasi inti di level 2,5%, mencerminkan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi kelompok *volatile food* berada di level 0,64% dan *administered price* sebesar 1,25%, didukung oleh koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Bank Indonesia. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2026, merupakan level yang ideal baik dari sisi konsumsi maupun produksi.

17. **Di tengah gejolak perekonomian global yang sangat menantang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terus dijaga tetap responsif dan efektif untuk menstabilkan ekonomi sekaligus melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat.** Realisasi APBN hingga April 2025 menunjukkan kinerja yang positif, dengan surplus anggaran Rp4,3 triliun atau 0,02% PDB, keseimbangan primer positif Rp173,9 triliun, dan posisi kas surplus Rp283,6 triliun (SILPA). Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27% dari target APBN. Realisasi penerimaan terus menunjukkan tren penguatan, menunjukkan aktivitas ekonomi tetap terjaga di tengah gejolak global. Belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat kita. APBN juga tetap optimal sebagai *shock absorber* yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha, dan menopang daya beli masyarakat.

Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang kami muliakan

18. Dengan gejolak global yang sangat tinggi dan dinamis, serta tantangan struktural yang kita hadapi, namun dengan fokus untuk terus menciptakan kemajuan yang konsisten, maka **kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk**

mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah. Strategi fiskal difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN melalui langkah: (i) stabilisasi ekonomi dengan meningkatkan diplomasi terkait perdagangan dan investasi melalui negosiasi, deregulasi, serta perluasan pasar ekspor. Termasuk sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan domestik untuk memperkuat pertumbuhan dan menjaga stabilitas dilakukan secara konsisten dan kredibel; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, menjaga defisit dan utang secara *prudent*, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas fiskal. Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN terus dilakukan.

19. **Indonesia terus memelihara posisi nonblok dalam suasana persaingan global yang meruncing dan menjaga kemitraan strategis** melalui diplomasi proaktif dan negosiasi secara strategis dengan Amerika Serikat, termasuk berbagai mitra dagang dan investasi utama dunia. Indonesia telah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan membawa proposal negosiasi yang komprehensif, yang berfokus pada penguatan ketahanan energi, perluasan akses pasar dengan tarif yang lebih kompetitif, percepatan deregulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan rantai nilai melalui kerja sama industri strategis dan mineral kritis. Proposal tersebut menjadi awal proses negosiasi yang konstruktif dan langkah tersebut sangat diapresiasi oleh Pemerintah Amerika Serikat.

20. **Negosiasi untuk mencapai *win-win solution* tersebut dipastikan tetap memegang prinsip kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa.** Kepentingan nasional tetap dijaga, antara lain dengan mengutamakan transfer teknologi dan inovasi di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan. Sebagai upaya penguatan dan mitigasi dampak negatif dari tarif Trump, Pemerintah juga memperluas penetrasi ekspor produk unggulan ke kawasan potensial lainnya, termasuk ASEAN+3, BRICS, dan Eropa. Proses negosiasi dan mencari pasar baru bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan. Namun, tidak berarti mustahil untuk diwujudkan. Segenap komponen bangsa dan di internal Pemerintah akan terus berkolaborasi dan bekerja keras untuk mewujudkannya, sebagaimana semangat Kebangkitan Nasional yang terus menyala dan tidak pernah padam sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang kami muliakan

21. **Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, maka strategi jangka menengah** difokuskan pada 8 (delapan) strategi yang mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.
22. **Pertama, mempercepat ketahanan pangan** dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Anggaran APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir. Instrumen kebijakan meliputi subsidi pupuk, bantuan alat dan

mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan pertanian, penyediaan benih unggul, dan penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan; menjaga pasokan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan; serta penguatan lumbung pangan.

23. **Kedua, mewujudkan ketahanan energi** dengan peningkatan *lifting* minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50. Kebijakan ini ditopang oleh investasi infrastruktur distribusi bahan bakar nabati, pengujian teknologi kendaraan, serta pengembangan ekosistem energi terbarukan. Pemerintah juga memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi untuk mendiversifikasi sumber energi nasional.
24. **Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG)** untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program MBG ini didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah. Pada 2026, MBG terus diperkuat untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan kualitas makanan yang semakin baik. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas.
25. **Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing** melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan

kebutuhan dunia usaha. Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.

26. **Kelima, menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas** untuk menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai asuransi kesehatan guna meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meminimalkan beban biaya kesehatan masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis; akselerasi penurunan *stunting* dan kasus penyakit menular; penguatan fasilitas kesehatan; serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.
27. **Keenam, memperkuat pembangunan Desa serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM** untuk menghidupkan ekonomi masyarakat dalam rangka menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, mengakselerasi ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. Upaya tersebut direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah.
28. **Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta** untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya penguatan pertahanan semesta menuju *minimum essential force* ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan memberdayakan industri strategis dalam negeri serta memperkuat komponen cadangan. Kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi juga ditingkatkan dan keamanan siber diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara.

29. **Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam *global value chain* yang lebih kuat.** Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global. Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas, diisi oleh sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para *expert* di level internasional. Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good corporate governance*.
30. **Danantara menerima mandat untuk menjalankan perbaikan operasional BUMN dan peningkatan kualitas investasi.** Untuk fungsi operasional, Danantara sebagai *super holding* BUMN membangun sinergi dan efisiensi di antara berbagai entitas BUMN, sehingga aset negara dapat dikelola secara terintegrasi dan produktif untuk mendukung agenda pembangunan. Sebagai fungsi investasi, Danantara menjadi pengelola investasi aset dan dana Pemerintah untuk akselerasi investasi produktif sesuai prioritas pembangunan Pemerintah. Untuk fungsi ini, Danantara mengoptimalkan perannya dalam menarik investasi swasta, baik nasional maupun asing (*leverage*). Fokus investasi antara lain diarahkan pada sektor terkait hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, hulu strategis, serta ketahanan pangan sebagai motor utama pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian. Pemerintah juga tetap menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti *tax holiday*, *super deduction* untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional dengan perspektif nilai tambah lebih tinggi bagi perekonomian.

31. **Selain dengan strategi investasi yang diarahkan lebih produktif, Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas SDM, adopsi teknologi yang lebih efisien, serta perbaikan regulasi.** Dengan upaya tersebut, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) sebagai rasio yang mencerminkan produktivitas investasi dibandingkan nilai tambah terhadap perekonomian akan semakin rendah. Kondisi ini mencerminkan investasi yang ditanamkan semakin efisien di dalam menghasilkan *output* ekonomi.
32. Dengan terlaksananya 8 (delapan) strategi kebijakan tersebut, niscaya mengukuhkan **fondasi yang kokoh menuju Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.**

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

33. **APBN harus terus dijaga sehat dan kredibel,** dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka meningkatkan mobilisasi pendapatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja dan pemerataan kemajuan ekonomi.
34. **Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan.** Reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta penyederhanaan administrasi. Optimalisasi perluasan basis pemajakan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, termasuk dengan penggunaan Coretax dalam pengelolaan data dan perbaikan kebijakan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi, termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antarinstansi / antarlembaga. Penerapan Global Taxation Agreement juga menjadi peluang bagi perluasan

basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara.

35. **Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi.** Penguatan PNBPN dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan serta upaya perbaikan administrasi dan layanan, **pendapatan negara akan meningkat, mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB.**
36. **Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.** Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan subsidi energi dan nonenergi juga terus disempurnakan dari sisi ketepatan sasaran, selaras dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos, termasuk penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan. Pemerintah juga memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, **belanja negara dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB.**
37. Dalam menghadapi tekanan global dan mengatasi masalah struktural nasional, **kebijakan fiskal dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% PDB.** Kebijakan fiskal sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi *counter cyclical* yang efektif dan tepat dari sisi *timing* pelaksanaan, dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat yang terus

diperkuat, serta keberlanjutan fiskal yang dipastikan tetap terjaga. **Pembiayaan fiskal dijaga secara inovatif, prudent, dan sustainable** untuk mendorong peningkatan investasi pemerintah dalam perekonomian yang ditempuh, dengan: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan *manageable*; (2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, dan SMV yang disinergikan melalui keberadaan Danantara; (3) memanfaatkan SAL untukantisipasi ketidakpastian; (4) peningkatan akses pembiayaan investasi dan modal kerja dan/atau rumah bagi MBR dan UMKM; serta (5) mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang *sustainable*.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

38. **Di tengah berbagai tantangan global, kita perlu terus bekerja keras serta meningkatkan kolaborasi dan persatuan antarkomponen bangsa.** Hal tersebut perlu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diasumsikan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Inflasi tetap dijaga rendah, transformasi dan reformasi ekonomi dilaksanakan secara konsisten dengan kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, termasuk perbaikan iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045.
39. **Dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi,** suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada pada kisaran 6,6% – 7,2% didukung dengan *spread* yang menarik dan *trust* investor terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang dijaga dengan baik. Minat beli investor di pasar SBN, ditambah investasi asing langsung serta kinerja ekspor yang terus dipertahankan tetap kuat menciptakan stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, di rentang

Rp16.500 – Rp16.900. Sementara itu, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5% dengan berbagai upaya baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

40. **Mencermati tensi geopolitik yang saat ini masih berlanjut serta tekanan di sisi aktivitas ekonomi global**, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD60 – USD80 per barel. *Lifting* minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari; dan *lifting* gas 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari dengan dukungan percepatan rencana investasi, termasuk pemanfaatan teknologi tinggi untuk mendorong produktivitas.
41. **Dengan berbagai latar belakang tersebut, kebijakan fiskal terus efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan, termasuk mewujudkan angka kemiskinan yang semakin rendah.** Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5% dari target tahun 2025 di rentang 7,0% – 8,0%. Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%. Rasio Gini ditargetkan terus membaik, dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

42. Demikian Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026. **Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat**, dalam pembahasan pada Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, *“Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”* Semoga kita semua bisa saling mendukung dalam kebaikan, untuk membangun Indonesia penuh dedikasi dan keikhlasan. Kita kobarkan terus semangat Kebangkitan

Nasional untuk mendarmabaktikan segenap potensi bagimenjaga dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Tangguh, Mandiri dan Sejahtera. Semoga kita semua dalam menjalankan tugas negara selalu amanah, dalam kekuatan iman dan takwa serta diberikan kemudahan, perlindungan, dan petunjuk dari Allah SWT.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 20 Mei 2025

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati